

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, TATA KELOLA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA KPU PROVINSI JAMBI

Abdul Aziz^{1)*}, Fitriaty²⁾

¹⁾Sekretariat KPU Provinsi Jambi

²⁾Program Studi Magister Manajemen FEB Universitas Jambi

*Email Korespondensi: Ajied.jbi@gmail.com

Abstrak

Kajian terhadap berbagai prediktor kinerja lembaga publik semakin gencar dilakukan. Mengingat kinerja merupakan tolak ukur pertanggungjawaban lembaga publik sehingga hal-hal yang dapat memberi pengaruh positif perlu diidentifikasi. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dinilai efektif menjalankan fungsinya bila memiliki kinerja yang baik. Penelitian ini bermaksud menguji kekuatan pengaruh perencanaan anggaran, tata kelola dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja KPU Provinsi Jambi. Melalui pendekatan kuantitatif korelasional, penelitian melibatkan 38 komisioner dan staf KPU Provinsi Jambi untuk dimintai persepsinya dalam survey daring. Kuesioner persepsi tata kelola (good governance) diadaptasi dari Wardhani, Rossieta, dan Martani, (2017) dan persepsi sistem pengendalian internal diadaptasi dari Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2013). Indikator tata kelola meliputi demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, dan keadilan serta kesertaan. Sedangkan persepsi sistem pengendalian internal diukur berdasarkan indikator lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal. Kinerja diukur berdasarkan lembar kriteria evaluasi (LKE) sistem akuntabilitas kinerja tahun 2021. Data kemudian dianalisis dengan Structural Equation Modelling (SEM) berbasis komponen partial least squares path modeling (PLS- SEM). Hasil penelitian menunjukkan perencanaan anggaran, tata kelola dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja, baik saat diukur bersama-sama maupun parsial (terpisah). Luaran penelitian dapat dimanfaatkan oleh KPU Provinsi Jambi sebagai bahan kajian dalam memperkuat sistem penyelenggaraan pemilu khususnya yang berkaitan dengan penerapan good governance dan pengendalian internal.

Kata kunci: kinerja, perencanaan anggaran, sistem pengendalian internal, tata kelola, komisi pemilihan umum (KPU)

Abstract

Studies on various predictors of public institution performance are increasingly being conducted, as performance is a measure of public institution accountability, and things that can have a positive influence must be identified. If the General Election Commissions (KPU) performs well as an election organizer, it is considered effective in carrying out its functions. The purpose of this research is to look into the impact of budget planning, governance, and internal control systems on the performance of KPU Jambi Province. Using a correlational quantitative approach, the study asked 38 commissioners and KPU Jambi Province staff for their opinions via an online survey. The good governance perception questionnaire was adapted from Wardhani, Rossieta, and Martani (2017), and the perception of the internal control system was adapted from the Treadway Commission's Committee of Sponsoring Organizations (2013). Democracy, transparency,

accountability, legal culture, and fairness and inclusion are all governance indicators. Meanwhile, indicators of the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and internal control monitoring are used to assess the perception of the internal control system. The evaluation criteria sheet (LKE) of the 2021 performance accountability system is used to assess performance. The data is then analyzed using component-based partial least squares path modeling in Structural Equation Modeling (SEM) (PLS-SEM). According to the study's findings, budget planning, governance, and internal control systems have a significant positive effect on performance when measured jointly and separately (separately). The research findings can be used by the KPU of Jambi Province as research material to strengthen the election management system, particularly those related to the implementation of good governance and internal control.

Keywords: *Performance, budget planning, internal control system, governance, and the General Election Commission are all keywords (KPU)*

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesi pemerintahan yang demokratis disyaratkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan sejak saat itu. Organisasi yang amanah perlu mendukung terselenggaranya pemilihan umum yang terbuka untuk umum, langsung, bebas, dan adil, serta akuntabel kepada pemilih. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk dan harus memiliki tingkat kejujuran yang tinggi, bersikap netral terhadap salah satu calon yang mencalonkan diri, memahami tugas dan kewajiban KPU, serta melindungi hak politik masyarakat (Sabrina & Ristawati, 2021).

KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan pemilihan umum berkomitmen dan berpedoman pada asas kemandirian, kejujuran, keadilan, ketertiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum, terbuka, profesional, efisien, dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilihan umum anggota parlemen (DPR), anggota dewan perwakilan daerah (DPD), serta anggota parlemen daerah (DPRD). Selain itu, tanggung jawabnya meliputi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pemilukada), yang menyangkut pemilihan langsung gubernur, wakil gubernur, dan walikota atau bupati.

KPU Provinsi Jambi merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap mandiri (independen) yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum pada tingkat Provinsi Jambi sekaligus menjadi koordinator bagi KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Untuk menjalankan segala kegiatan maka dibutuhkan dana untuk membiayainya. Dalam hal ini kebutuhan dana dituangkan di dalam anggaran. Anggaran KPU Provinsi Jambi terdiri dari anggaran APBN dan APBD. Anggaran tersebut dimuat dalam laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penilaian kinerja keuangan yang tertuang dalam laporan keuangan. Anggaran dapat diukur dari tingkat realisasi, dimana di instansi pemerintah seperti KPU Provinsi Jambi dinamakan realisasi belanja, bila realisasi belanja mendekati jumlah anggaran, mencapai target dan tepat sasaran maka menampakkan kinerja yang baik (*good performance*). Namun jika sebaliknya jika penyerapan sangat jauh dari harapan maka akan berdampak buruk terhadap kinerja instansi (*bad performance*).

Dari pengamatan awal di dalam laporan realisasi anggaran 2018-2020, anggaran KPU Provinsi Jambi dalam penggunaan anggaran menunjukkan adanya kelemahan yaitu terjadinya selisih antara target anggaran dengan realisasi, memungkinkan adanya pelaksanaan anggaran yang tidak efektif dan efisien pada tahun berjalan di KPU Provinsi Jambi. Penyebabnya bisa saja karena adanya pengeluaran anggaran belanja tidak tepat waktu dalam pembiayaan anggaran belanja atau adanya penetapan standar pasar yang melebihi nilai pasar, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kinerja instansi.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kinerja diantaranya 1) perencanaan anggaran, 2) penerapan tata kelola (*good governance*), dan 3) penerapan sistem pengendalian internal (Fadilah, 2013; Pratolo, 2007).

Salah satu bentuk penilaian kinerja yang baik dapat dilihat yaitu dari hasil capaian penyerapan anggaran itu sendiri. Pengukuran dalam pencapaian kinerja sangat penting dalam menilai akuntabilitas organisasi dan manager dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Nasution (2018) membuktikan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Tanjung Balai.

Penerapan prinsip-prinsip *good government governance* merupakan salah satu variabel penting dalam pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja. Konstitusi mengamanatkan agar pelaksanaan anggaran belanja dilakukan secara akuntabel dan transparan (Widhianto, 2011). Penerapan prinsip-prinsip *good governance* mendorong pengelola keuangan akan lebih bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya dan lebih terbuka terhadap informasi yang dimilikinya. Keterbukaan informasi ini memberikan pilihan putusan yang lebih baik bagi pengelola keuangan dalam pengambilan keputusan kolektif. Oleh karena itu, ketika pilihan-pilihan keputusan yang jelas dan terarah telah tersedia melalui pelaksanaan prinsip-prinsip *good government governance*, maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Penyelenggaraan prinsip-prinsip *good corporate governance* berkontribusi pada kinerja organisasi (Pratolo, 2007). Penerapan *good government governance* berkontribusi pada kinerja organisasi (Fadilah, 2013). *Good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Azlina & Amelia, 2015).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Anggaran

Hampir semua bentuk anggaran atau penganggaran pemerintah berada dalam yurisdiksi birokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah anggaran berarti perkiraan pemasukan dan pengeluaran untuk suatu waktu tertentu atau jangka waktu tertentu. Anggaran berarti penyusunan pemasukan dan pengeluaran. Penyusunan anggaran berada dalam yurisdiksi administrasi publik yang dijalankan dan diawasi oleh aparatur sipil negara (Arifah, 2012). Oleh karena itu penganggaran merupakan fungsi penting dari birokrasi. Penyusunan perkiraan pengeluaran dan pendapatan dilakukan di bawah bimbingan menteri keuangan. Pengelolaan atau administrasi negara tergantung pada uang yang diperkirakan oleh departemen keuangan dan disetujui oleh parlemen.

Terdapat siklus anggaran dalam setiap penetapan anggaran yang mengacu pada tahapan-tahapan tertentu yang saling terkait. Mardiasmo (2018) mengklasifikasikan empat

langkah ke dalam urutan proses: perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi.

Penganggaran biasanya dilakukan pada berbagai langkah, prosedur, kegiatan, atau metode penyusunan yang digunakan, menentukan jenis anggaran. Walaupun terdapat perbedaan jenis anggaran dalam beberapa hal, namun tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, sehingga waktu dan situasi dapat menentukan bagaimana jenis anggaran tertentu digunakan. Penyusunan anggaran dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis *line item budgeting*, atau Penganggaran tradisional mengacu pada departemen atau bagian tertentu dalam organisasi sehingga menekankan pada pengendalian pendapatan (pajak, retribusi, serta dari hibah, bantuan, dan pinjaman) dan pengeluaran (biaya gaji atau karyawan, biaya sewa peralatan, biaya sewa peralatan, biaya perjalanan bisnis, dll.). Keuntungannya adalah mereka relatif mudah untuk melacak dan mengamankan komitmen di antara para peserta untuk mengurangi konflik. Kelemahannya adalah kurangnya perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pencapaian realisasi pendapatan dan belanja yang ditargetkan diabaikan. Penyusun anggaran tidak memiliki alasan rasional untuk menetapkan target penerimaan dan pengeluaran (Parfet, 2000).

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

KPU termasuk dalam sektor publik karena alasan-alasan berikut: 1) seluruh bagian organisasi dibentuk oleh pemerintah dan mendapat kewenangan dari konstitusi secara langsung dan tidak langsung, 2) seluruh operasional organisasi dibiayai oleh sumber keuangan negara, dan 3) bersifat di bawah pengawasan lembaga negara. Sektor publik mencakup semua entitas yang didanai negara yang menjalankan program, layanan, dan barang publik, termasuk pembangunan, pemerintah, dan layanan publik (termasuk penyediaan barang dan layanan publik) (Sabrina & Ristawati, 2021).

Hubungan nilai dasar governansi hingga hasilnya diilustrasikan sebagai rumah governansi. Tiga pilar tata kelola sektor publik adalah perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja, kebijakan, dan tata kelola. Pilar-pilar ini menanamkan tata kelola dengan cita-cita inti dan instrumennya, dan memastikan bahwa tata kelola dilaksanakan secara efektif. Dalam jangka panjang, penggabungan tiga pilar ke dalam prinsip-prinsip yang menopang tata kelola sektor publik Indonesia akan mendorong pengembangan nilai-nilai tata kelola itu sendiri (KNKG, 2022).

OECD (dalam Wardhani, Rossieta, & Martani, 2017) mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya menjaga hubungan timbal balik antara pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan oleh organisasi pemerintah dan oleh organisasi yang dibentuk oleh otoritas pemerintah, yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan kebijakan secara efisien dan efektif, serta mengomunikasikannya secara terbuka dan memberikan pertanggungjawabannya untuk kepentingan para pemangku kepentingan. Secara spesifik, Sancoko, Tjik, Majid, Sumini, & Triatmoko, (2008) menyebut delapan karakteristik utama dalam governansi yakni partisipasi, budaya hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan dan inklusivitas, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.

Komite Nasional Kebijakan Pemerintahan Indonesia (KNKG, 2022) merumuskan nilai-nilai dasar dalam tata kelola publik yang baik publik yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum dan keadilan dan kesetaraan. Komite ini juga membuat pedoman aktualisasi prinsip-prinsip tersebut bagi pemerintah daerah yang meliputi pedoman bagi lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan non struktural. Nilai dasar tata pemerintahan yang baik di sektor publik mencakup demokrasi (*democracy*), transparansi

(*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), budaya hukum (*the culture of the law*) dan keadilan dan kesetaraan (*fairness and equality*).

Sistem Pengendalian Internal

Suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan orang lain suatu entitas untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan merupakan definisi sistem pengendalian internal (Graham, 2015).

Ada hubungan yang jelas antara struktur organisasi entitas dan tujuannya, komponen, yang mewakili apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan, dan struktur organisasi entitas secara keseluruhan. Tujuan adalah apa yang ingin dicapai oleh suatu entitas (unit operasi, badan hukum, dan lainnya).

Pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang terintegrasi. Kelima komponen tersebut bekerja sama secara mulus. "Beroperasi bersama" mengacu pada kesimpulan bahwa kelima komponen bersama-sama meminimalkan risiko tidak mencapai target ke tingkat yang dapat diterima. Komponen tidak boleh dipertimbangkan secara terpisah; melainkan, mereka harus dilihat sebagai sistem yang terintegrasi. Komponen saling bergantung, dengan banyak keterkaitan dan keterkaitan di antara mereka, terutama bagaimana prinsip berinteraksi di dalam dan di antara komponen, yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), risiko eksternal dan internal (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*).

Kinerja

Organisasi dinilai efektif jika berhasil mencapai kinerja optimalnya. Memanfaatkan indikator kinerja aktivitas memungkinkan pengukuran yang akurat dari tingkat pencapaian kinerja yang dicapai oleh organisasi. Pemanfaatan data kinerja memungkinkan penyelesaian pengukuran ini. Data kinerja diperoleh melalui sistem yang mengumpulkan data kinerja dari dua sumber, yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan rutin seperti mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, maupun laporan kegiatan lainnya; dan (2) data eksternal, yang digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Provinsi Jambi. Kedua jenis data tersebut diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja.

Kinerja merupakan tingkat pencapaian target untuk setiap indikator kegiatan. Menargetkan pencapaian metrik kinerja berorientasi pada keluaran/hasil. Target aktivitas digunakan untuk mengukur kinerja. 7 target kegiatan kesepakatan dapat dijelaskan melalui sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
- b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu
- c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
- d. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU
- e. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
- f. Fasilitasi pelaksanaan tahapan pemilu, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW
- g. Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

3. METODE PENELITIAN

Waktu penelitian dan Responden

Penelitian ini dilaksanakan sejak Mei hingga November 2022. Penelitian melibatkan 5 orang komisioner dan 28 orang staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah *nonprobability sampling* dengan metode sensus yaitu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi dijadikan sampel. Jadi, jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, yaitu 33 responden. Responden mengisi kuesioner melalui media daring *google form* secara sukarela.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional yang bertujuan untuk memberi bukti empiris atas pengaruh perencanaan anggaran, tata kelola, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Studi korelasional adalah metode penelitian deskriptif yang meneliti bagaimana dua variabel atau lebih dapat berubah dalam hubungannya satu sama lain. Setiap variabel tidak terkendali dan peneliti menentukan apakah ada hubungan dan karakteristik hubungan itu. Namun, tidak dapat membuktikan bahwa mengubah satu variabel akan mengubah yang lain atau memiliki hubungan sebab-akibat.

Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi lapangan dengan kuisisioner. Instrumen pengumpulan data disebut juga kuisisioner yang disebarakan langsung kepada responden yang ada di lingkungan KPU Provinsi Jambi. Metode pengumpulan data untuk setiap variabel dijabarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan anggaran.

Metode pengumpulan menggunakan studi dokumentasi yang bersumber dari Laporan Keuangan KPU Provinsi Jambi tahun 2019. Perhitungan persentase pencapaian anggaran berdasarkan SK Kepala LAN No. 239 Tahun 2003.

b. Tata Kelola Governansi yang Baik

Metode pengumpulan data untuk variable ini yakni melalui instrumen survey. Kuesioner diadaptasi dari Wardhani et al., (2017).

c. Sistem Pengendalian Internal

Metode pengumpulan data untuk variable ini yakni melalui instrumen survey. Kuesioner diadaptasi Kuesioner diadaptasi dari *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (2013).

d. Kinerja

Metode pengumpulan menggunakan studi dokumentasi yang bersumber dari Laporan Kinerja KPU Provinsi Jambi tahun 2019.

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) dan dibantu dengan *software* SmartPLS 3.0. PLS merupakan salah satu metode alternatif *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada hubungan diantara variabel yang sangat kompleks tetapi ukuran sampel data kecil (30-100 sampel) dan memiliki asumsi non parametrik, artinya bahwa data tidak mengacu pada salah satu distribusi tertentu. Di dalam PLS ada 3 jenis pengujian, 1) pengujian *outer model* (model pengukuran), 2) pengujian *inner model* (model structural), dan 3) pengujian hipotesis

Pengujian Outer Model (Model Pengukuran)

Pengujian *outer model* terdiri dari uji *convergent validity*, uji *discriminant validity*, dan *composite reliability*. Berikut penjelasan untuk tiap pengujian *Convergent validity* merujuk kepada derajat kesesuaian antara atribut hasil pengukuran alat ukur dan konsep-

konsep teoretis yang menjelaskan keberadaan atribut-atribut dari variabel tersebut. Uji *convergent validity* dilakukan dengan melihat item indikator validitas yang ditunjukkan oleh nilai *loading factor*. *Loading factor* adalah angka yang menunjukkan korelasi antara skor suatu item pertanyaan dengan skor indikator konstruk indikator yang mengukur konstruk tersebut. Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai *loading factor* di atas standar tertentu. Menurut Hair et al. (1998) untuk pemeriksaan awal dari matriks *loading factor* adalah kurang lebih 0,3 dipertimbangkan telah memenuhi level minimal, dan untuk *loading factor* kurang lebih 0,4 dianggap lebih baik, dan untuk *loading factor* lebih besar 0,5 secara umum dianggap signifikan.

Uji validitas selanjutnya yakni *discriminant validity*. *Discriminant validity* merujuk kepada derajat ketidaksesuaian antara atribut-atribut yang seharusnya tidak diukur oleh alat ukur dan konsep-konsep teoretis tentang variabel tersebut. Model memiliki *discriminant validity* yang lebih baik apabila akar kuadrat *Average Varian Extracted* (AVE) untuk masing-masing konstruk lebih besar dari korelasi antara dua konstruk di dalam model. Nilai AVE yang baik disyaratkan memiliki nilai lebih besar dari 0,50.

Outer model selain diukur dengan menilai *convergent validity* dan *discriminant validity* juga dapat dilakukan dengan melihat reliabilitas konstruk atau variabel laten yang diukur. Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode yaitu *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. *Cronbach's alpha* mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan *composite reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Namun, *composite reliability* dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel jika *composite reliability* mempunyai nilai > 0.7 .

Pengujian Inner Model (Model Struktural)

Setelah pengujian *outer model* yang telah memenuhi, berikutnya dilakukan pengujian *inner model* (model struktural). *Inner model* dapat dievaluasi dengan melihat skor *r-square* (reliabilitas indikator) untuk konstruk dependen dan nilai t-statistik dari pengujian koefisien jalur (*path coefficient*). Semakin tinggi nilai *r-square* berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Nilai *path coefficients* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan hasil pengujian *Inner Model* (model struktural) yang meliputi output *r-square*, koefisien parameter dan t-statistik. Untuk melihat apakah suatu hipotesis itu dapat diterima atau ditolak diantaranya dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, t-statistik, dan *p-values*. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan bantuan software SmartPLS (Partial Least Square) 3.0. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari hasil kalkulasi *bootstrapping*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Deskriptif

Secara deskriptif, jawaban responden atas persepsi tata kelola dan sistem pengendalian internal dijabarkan pada tabel 5.1 dan 5.2. Ukuran deskriptif yang digunakan yaitu total skor yang berarti jumlah keseluruhan skor (dengan rentang antara 33 hingga 180) dan rerata/*mean* yang berarti hasil bagi total skor dan jumlah responden. Analisis deskriptif ini bermanfaat untuk mengetahui butir pernyataan yang memiliki total skor dan rerata terendah dan tertinggi.

Pada variabel tata kelola, responden memberi skor tertinggi pada butir yang berbunyi "KPU Provinsi Jambi menjalin kerjasama antar lembaga publik" dengan total skor 173 dan

rerata 4.81. Adapun skor terendah terdapat pada butir pernyataan “Sistem kepegawaian di KPU Provinsi Jambi dikelola secara daring melalui Sistem Informasi Kepegawaian yang disiapkan dari KPU RI” dengan perolehan total skor 158 dan rerata 4.39. Meski demikian, seluruh skor mendapat rerata di atas 4 yang berarti responden menilai secara umum bahwa KPU Provinsi Jambi telah mengimplementasikan tata kelola yang sangat baik (*good governance*).

Pada variabel sistem pengendalian internal, responden memberi skor tertinggi pada butir yang berbunyi “KPU Provinsi Jambi menunjukkan komitmen untuk mempertahankan pegawai yang kompeten” dengan total skor 171 dan rerata 4.75. Adapun skor terendah terdapat pada butir pernyataan “KPU Provinsi Jambi mengimplementasikan aktivitas pengendalian sesuai SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)” dengan perolehan total skor 156 dan rerata 4.33. Meski demikian, seluruh skor mendapat rerata di atas 4 yang berarti responden menilai secara umum bahwa KPU Provinsi Jambi telah mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang baik.

Pengujian Outer Model (Model Pengukuran)

Pengujian *outer model* terdiri dari uji *convergent validity*, uji *discriminant validity*, dan *composite reliability*. *Convergent validity* merujuk kepada derajat kesesuaian antara atribut hasil pengukuran alat ukur dan konsep-konsep teoretis yang menjelaskan keberadaan atribut-atribut dari variabel tersebut. Uji *convergent validity* dilakukan dengan melihat item indikator validitas yang ditunjukkan oleh nilai *loading factor*. *Loading factor* adalah angka yang menunjukkan korelasi antara skor suatu item pertanyaan dengan skor indikator konstrak indikator yang mengukur konstrak tersebut.

Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai *loading factor* di atas standar tertentu. Menurut Hair et al. (1998) untuk pemeriksaan awal dari matriks *loading factor* adalah kurang lebih 0,3 dipertimbangkan telah memenuhi level minimal, dan untuk *loading factor* kurang lebih 0,4 dianggap lebih baik, dan untuk *loading factor* lebih besar 0,5 secara umum dianggap signifikan. Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan SmartPLS 3.0 hasil *loading factor* dapat ditunjukkan seperti pada Tabel 5.3. Berdasarkan tabel 5.3, skor *loading factor* untuk semua item berada di atas 0.5 sehingga dinyatakan valid, kecuali butir GK1 yang tidak valid karena skornya masih di bawah 0.5.

Uji validitas selanjutnya yakni *discriminant validity*. *Discriminant validity* merujuk kepada derajat ketidaksesuaian antara atribut-atribut yang seharusnya tidak diukur oleh alat ukur dan konsep-konsep teoretis tentang variabel tersebut. Model memiliki *discriminant validity* yang lebih baik apabila akar kuadrat *Average Variance Extracted* (AVE) untuk masing-masing konstrak lebih besar dari korelasi antara dua konstrak di dalam model. Nilai AVE yang baik disyaratkan memiliki nilai lebih besar dari 0,50. Berdasarkan tabel 1, skor AVE untuk semua variabel berada di atas 0.5 sehingga dinyatakan valid kembali.

Tabel 1. Nilai *Average Variance Extracted*

	<i>Average Variance Extracted</i> (AVE)
Per_Keuangan	1.000
Tata_Kelola	0.576
Peng_Internal	0.541
Kinerja	0.627

Outer model selain diukur dengan menilai *convergent validity* dan *discriminant validity* juga dapat dilakukan dengan melihat reliabilitas konstrak atau variabel laten yang diukur. Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode yaitu *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. *Cronbach's alpha* mengukur batas bawah nilai reliabilitas

suatu konstruk sedangkan *composite reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Namun, *composite reliability* dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel jika *composite reliability* mempunyai nilai > 0.7 . Berdasarkan tabel 2, skor *composite reliability* dan *cronbach's alpha* untuk semua variabel berada di atas norma standar sehingga dinyatakan reliabel.

Tabel 2. Nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha*

	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Per_Keuangan	1.000	1.000
Tata_Kelola	0.964	0.960
Peng_Internal	0.946	0.938
Kinerja	0.893	0.849

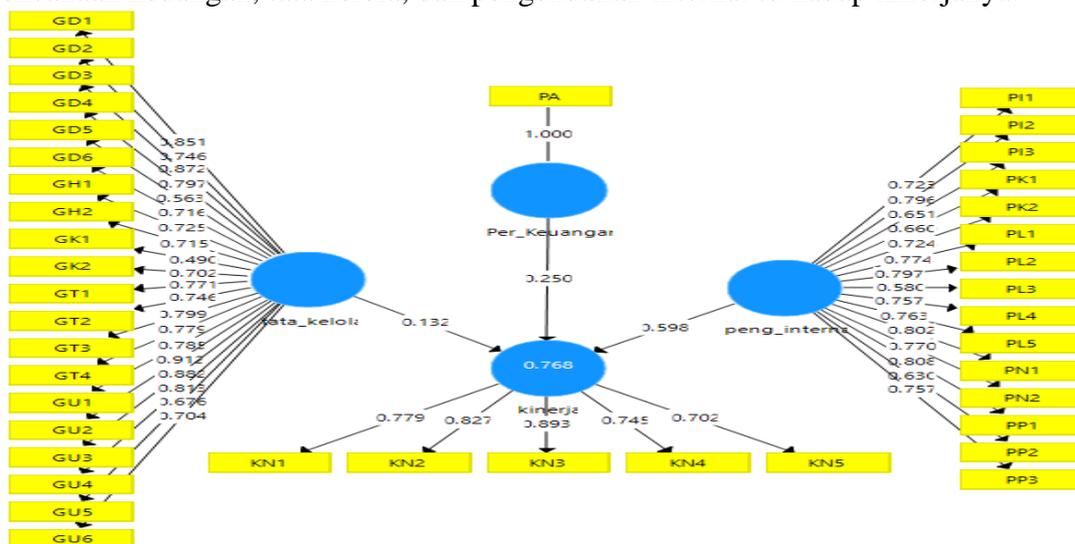
Pengujian Inner Model (Model Struktural)

Setelah pengujian *outer model* yang telah memenuhi, berikutnya dilakukan pengujian *inner model* (model struktural). *Inner model* dapat dievaluasi dengan melihat skor *r-square* (reliabilitas indikator) untuk konstruk dependen dan nilai t-statistik dari pengujian koefisien jalur (*path coefficient*). Semakin tinggi nilai *r-square* berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Nilai *path coefficients* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Nilai *R square* dan *path coefficient* dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Nilai R square pada variabel dependen Kinerja

	R square	R square adjusted
Kinerja	0.768	0.747

Tabel 3 menunjukkan bahwa 73 variabel bebas X (perencanaan keuangan, tata kelola, dan pengendalian internal) mampu menjelaskan variabilitas konstruk kinerja sebesar 76,8%, dan sisanya sebesar 23,2% diterangkan oleh konstruk lainnya di luar yang diteliti dalam penelitian ini. Gambar 1 menerangkan lebih rinci derajat pengaruh variabel perencanaan keuangan, tata kelola, dan pengendalian internal terhadap kinerjanya.



Gambar 1 Model struktural penelitian

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat apakah suatu hipotesis itu dapat diterima atau ditolak diantaranya dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, t-statistik, dan *p-values*. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan bantuan

software SmartPLS (Partial Least Square) 3.0. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari hasil kalkulasi *bootstrapping*. *Rules of thumb* yang digunakan pada penelitian ini adalah t-statistik > 2,28 (N = 33) dengan tingkat signifikansi *p-value* < 0,05 (5%) dan koefisien beta bernilai positif. Nilai pengujian hipotesis penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Nilai *path coefficient*, *Standard Deviation*, T Statistik, dan *P Values* untuk pengaruh total (*Total Effect*)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Per_Keuangan -> kinerja	0.25	0.263	0.133	2.887	0.04
peng_internal -> kinerja	0.598	0.578	0.118	5.088	0.0
tata_kelola -> kinerja	0.132	0.152	0.143	2.923	0.03

Hipotesis pertama menguji apakah Perencanaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja KPU Provinsi Jambi. Hasil pengujian menunjukkan skor T statistik 2.887 > 2.28 dan skor P Value 0.04 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis 1 (H₁) yang menyebutkan bahwa Perencanaan Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja KPU Provinsi Jambi diterima. Hasil penelitian ini mampu memberikan dukungan pada penelitian (Ahmad, Tui, & Iqbal, 2021; Purnomo, 2005) bahwa perencanaan keuangan yang baik memberikan luaran kinerja yang baik juga. Perencanaan keuangan yang baik menjadi refleksi bahwa organisasi tersebut efektif dalam pencapaian tujuannya. Semua lembaga pemerintah wajib tunduk pada PMK No.155/PMK.02 Tahun 2015 yang menyatakan mengatur standar biaya adalah batas tertinggi yang jumlahnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dalam satu tahun anggaran. Dalam hal ini menjadi masuk akal bila kinerja sangat berkaitan dengan perencanaan anggaran.

Hipotesis kedua menguji apakah Tata Kelola berpengaruh terhadap Kinerja KPU Provinsi Jambi. Hasil pengujian menunjukkan skor T statistik 5.088 > 2.28 dan skor P Value 0.00 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis 2 (H₂) yang menyebutkan bahwa Tata Kelola (*Good Governance*) berpengaruh terhadap Kinerja KPU Provinsi Jambi diterima. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa tata kelola (*good governance*) dalam organisasi KPU memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kinerja KPU dan selaras dengan penelitian (Pratolo, 2008; Yeni, 2019). Tata kelola berhasil menjadi prediktor yang baik untuk memprediksi kekuatan kinerja baik di lembaga publik maupun privat. Tata kelola pemerintahan organisasi sektor publik diperlukan untuk mencegah kejadian yang tidak menguntungkan, tuduhan penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab, dan kegagalan organisasi itu sendiri. Masyarakat memiliki harapan yang lebih tinggi tentang bagaimana organisasi harus berperilaku dan seberapa baik kinerja mereka dalam hal menyediakan layanan publik, yang merupakan salah satu alasan mengapa tata kelola sektor publik menjadi kebutuhan mendesak yang semakin meningkat.

Hipotesis ketiga menguji apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja KPU Provinsi Jambi. Hasil pengujian menunjukkan skor T statistik 2,923 > 2.28 dan skor P Value 0.00 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis 3 (H₃) yang menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja KPU Provinsi Jambi diterima. Hasil penelitian ini mampu mendukung studi Afrida (2013) dan Hanum, Hafsa, & Ritonga, (2021) tentang adanya pengaruh sistem pengendalian internal terhadap peningkatan kinerja

organisasi. Sistem pengendalian internal meliputi aturan dan proses yang memastikan komisioner dan sekretariat KPU Provinsi Jambi dapat mengurangi risiko tidak tercapainya kinerja terbaik.

Hipotesis keempat menguji apakah perencanaan keuangan, tata kelola, dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama (kolektif) berpengaruh signifikan terhadap kinerja KPU Provinsi Jambi. Skor R square menunjukkan ketiga variabel secara bersama-sama mampu menjelaskan variabilitas kontrak kinerja sebesar 76,8%, dan sisanya sebesar 23,2% diterangkan oleh kontrak lainnya di luar yang diteliti dalam penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Perencanaan keuangan berpengaruh terhadap Kinerja KPU Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini mampu memberikan dukungan pada argumen bahwa perencanaan keuangan yang baik memberikan luaran kinerja yang baik juga.
2. Tata kelola (*Good Governance*) berpengaruh terhadap Kinerja KPU Provinsi Jambi. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa tata kelola (*good governance*) dalam organisasi KPU memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kinerja KPU.
3. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap Kinerja KPU Provinsi Jambi. Hubungan ini memiliki pengertian sistem pengendalian internal yang diterapkan dengan baik dapat meningkatkan kinerja organisasi.
4. Secara bersama-sama, perencanaan keuangan, tata kelola, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja KPU Provinsi Jambi

Saran

Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai penguat dan pengaya dalam penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal perekrutan pegawai di lingkungan KPU, pemerintah dapat memperhatikan aspek-aspek yang mendukung terwujudnya tata kelola dan implementasi pengendalian internal yang lebih baik.

Mengingat banyak variabel yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja, maka peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi variabel lain yang berpotensi memiliki kekuatan prediktor baik faktor personal KPU maupun faktor lingkungan kerja. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja penyelenggara pemilu ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, N. (2013). Pengaruh desentralisasi dan sistem pengendalian intern Pemerintah terhadap kinerja manajerial skpd (studi empiris pada pemerintah kota padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Ahmad, H., Tui, S., & Iqbal, I. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pertanggungjawaban Keuangan Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Pada Kantor Kemenag Kota Makassar. *MM Journal*, 2(1), 61–72.
- Arifah, D. A. (2012). Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik. *Jurnal Prestasi*, 9(1), 85–95.
- Azlina, N., & Amelia, I. (2015). Pengaruh Good Governance dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah kabupaten pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12(2), 32–42.
- Creswell, J. W. (2002). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative* (Vol. 7). Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.

- Fadilah, S. (2013). The influence of good governance implementation to organization performance: Analysis of factors affecting. *The International Journal of Social Sciences*, 7(1), 15–33.
- Graham, L. (2015). *Internal control audit and compliance: documentation and testing under the new COSO framework*. John Wiley & Sons.
- Hanum, Z., Hafsa, H., & Ritonga, P. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Kampus Islam Swasta di Kota Medan. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 814–819.
- Jokipii, A. (2010). Determinants and consequences of internal control in firms: a contingency theory based analysis. *Journal of Management & Governance*, 14(2), 115–144.
- KNKG. (2022). *Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia*. Retrieved from <https://knkg.or.id/wp-content/uploads/2022/06/PUGSPI-2022-LORES.pdf>
- Manurung, F. H. (2015). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi*.
- Mardiasmo, M. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. *Penerbit Andi*. Yogyakarta.
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(2), 15–25.
- Parfet, W. U. (2000). Accounting subjectivity and earnings management: A preparer perspective. *Accounting Horizons*, 14(4), 481.
- Pratolo, S. (2007). Good corporate governance dan kinerja BUMN di Indonesia: Aspek audit manajemen dan pengendalian intern sebagai variabel eksogen serta tinjauannya pada jenis perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makassar*, 26–28.
- Pratolo, S. (2008). Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam Hubungannya Dengan Perwujudan Keadilan Dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur Dan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 9(2), 108–124.
- Purnomo, Y. A. (2005). *Analisis hubungan perencanaan dan pengendalian keuangan dengan kinerja keuangan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 1998-2002*. Universitas Gadjah Mada.
- Sabrina, D. F., & Ristawati, R. (2021). The Implementation of Good Governance In The Presidential Election In Indonesia. *Yuridika*, 36(2), 281–294.
- Sancoko, B., Tjik, A. S. D., Majid, N. C., Sumini, S., & Triatmoko, H. (2008). Kajian terhadap Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia. *Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI*.
- Santoso, A. B. (2021). Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(4).
- Suriani, S. (2015). The effect of performance-based budgeting implementation towards the institution performance accountability (case study: Wajo). *Information Management and Business Review*, 7(4), 6–22.
- Wardhani, R., Rossieta, H., & Martani, D. (2017). Good governance and the impact of government spending on performance of local government in Indonesia. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 3(1), 77–102.
- Widhiyanto, W. (2011). *Good Governance Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat*. Jakarta: Tesis. Tidak Terbit. Universitas Indonesia.

- Widianto, A., Harjanti, R. S., Utami, E. U. S., & Sari, Y. P. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sebagai Instrumen Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Kecamatan Brebes). *ACCOUNT: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 5(2).
- Yeni, Y. (2019). *Analisis Hubungan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Internasional Batam.